

# DAFTAR ISI

**Pengantar Redaksi** — 103

**Implementasi Kebijakan Kartu Menuju Sehat (KMS)**

**Pemerintah Kota Yogyakarta di Bidang Pendidikan**

*Fajar Sidik* — 105

***Social Media* dan Eksklusi Remaja dalam Perumusan Kebijakan Publik**

*Bevaola Kusumasari* — 119

***Jimpitan*, Modal Sosial yang Menjadi Solusi Permasalahan Masyarakat**

*Wiji Harsono* — 131

**Pengukuran Kinerja Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan  
di Desa Wisata Brayut**

*Nisa Agistiani Rachman* — 147

**Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan**

*Lalu Fadlurrahman* — 161

**Transparansi Birokrasi dalam Pengelolaan APBD di Kota Kupang**

*I Putu Yoga Bumi Pradana* — 185

**Indeks** — 203

**Ucapan Terima Kasih** — 205

**Panduan untuk Penulis** — 206



## ***Jimpitan*, Modal Sosial yang Menjadi Solusi Permasalahan Masyarakat**

**Wiji Harsono**

**Kasubbag Umum Kepegawaian**

**Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur**

**marezindwijiharsono@gmail.com**

### ***Abstrak***

*Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat kerap menyelesaikan berbagai masalah sosial dengan menggunakan nilai-nilai yang telah terbentuk dan disepakati sebagai sebuah norma. Norma atau pedoman yang dipatuhi ini seringkali berwujud sebuah institusi informal. Kepatuhan warga kemudian melahirkan rasa saling percaya dan menyebabkan terjalinnya jaringan sosial, kemudian membentuk pola perilaku sehingga tumbuh menjadi budaya dalam bentuk pemberdayaan warga. Salah satu bentuk norma sosial ini adalah “jimpitan”, yang diberlakukan di RT 70 dan RT 71, RW 19 Danunegaran Yogyakarta. Artikel ini akan membahas mengenai bagaimana institusi jimpitan sebagai modal sosial menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan warga di kampung tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif induktif, terlihat bahwa lemahnya fungsi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik membuat warga RT 70 dan RT 71, RW 19 Danunegaran memilih institusi jimpitan sebagai modal sosial dalam menyelesaikan permasalahan warga, terutama berkenaan dengan penguatan tali silaturahmi serta perbaikan dan pemeliharaan sarana pelayanan publik. Mereka memilih institusi ini karena dianggap paling sesuai dengan kondisi warga. Jimpitan yang semula hanya bertujuan untuk pengikat tali silaturahmi warga kini justru menjadi jembatan bagi pengikat tali silaturahmi yang terbentuk pada modal sosial lainnya.*

***Kata kunci:*** Modal sosial, jimpitan, institusi informal, masyarakat perkotaan, pemberdayaan.

### ***Abstract***

*In the daily life, people often resolve social problems by using the values that have been established and agreed upon as a norm. Norms or guidelines that are adhered to is often a form of informal institutions. People's adherence creates a sense of mutual trust that leads to the establishment of a social network, then forms a pattern of behavior so that it grows into a culture in the form of citizen empowerment. One form of this social norm is “jimpitan”, imposed on RT 70 and RT 71, RW 19 Danunegaran, Yogyakarta. This article will discuss how social capital institutions (“jimpitan”) becomes a solution to overcome the problems in the community. Using an inductive qualitative approach, it appears that the lack of government functions to meet the needs of public service makes the residents of RT 70 and RT 71, RW 19 Danunegaran choose jimpitan institutions as social capital in resolving the problems, especially with respect to strengthen the relationship and preserve public services and facilities. They choose this institution because it is considered the most suitable. Jimpitan which was originally only intended for people's bonding now becomes a bridge for other social capitals.*

***Key words:*** social capital, jimpitan, informal institution, urban community, empowerment.

## I. PENDAHULUAN

Bangsa ini sudah terlalu banyak mengalami cobaan yang bisa juga merupakan sebuah teguran dalam perjalanan sejarahnya untuk menjadi suatu bangsa yang besar dan benar; banyak kemajuan yang sudah dicapai, akan tetapi hingga dekade terkini upaya yang dilakukan untuk mencapai pemerataan kesejahteraan seakan mengalami stagnasi yang berkepanjangan. Kemampuan masyarakat yang tak seragam dalam memenuhi kebutuhan dasar, berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan masih banyak kebutuhan lainnya, cenderung memperlebar kesenjangan yang tentu saja menimbulkan permasalahan yang terus tumbuh, bahkan menjadi warna khas negeri ini.

Badai krisis ekonomi bermula pada tahun 1998 dan reformasi yang tak kunjung memberikan perubahan konstruktif secara signifikan baik secara nasional maupun lokal, ditambah gempa yang mengguncang Indonesia seperti di Aceh dan Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 dan Erupsi Merapi tahun 2010 lalu, juga turut menyumbang peningkatan angka kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menurut Effen-di DP selaku Kepala BPS DIY, jumlah orang miskin DIY bertambah 3.350 orang dalam rentang enam bulan dari 560.880 pada bulan Maret 2011 menjadi 564.230 orang pada bulan September 2011 (2012, 2). Ditambahkan oleh Rahmawati (2012, 2) selaku Kepala Bidang Statistik Sosial BPS DIY, lonjakan angka tersebut disebabkan oleh erupsi Merapi tahun 2010.

Perbaikan dan pemeliharaan sarana jalan dan saluran limbah terutama yang berada di lingkungan RT, belum banyak tersentuh dan tentu saja mengganggu kenyamanan dan keamanan warga selaku pengguna. Suhartono (2008) Ketua Komisi III DPRD Kota Yogyakarta mengungkapkan bahwa jalan yang rusak di Kota Yogyakarta kebanyakan jalan kecil di kelurahan maupun di kampung. Selama ini perhatian pemerintah terhadap jalan kampung masih minim karena terkonsentrasi jalan utama, padahal jalan kecil ini sangat vital untuk warga dan jika tidak segera diperbaiki dikhawatirkan akan mengganggu kenyamanan dan keselamatan.

Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Yogyakarta, Totok Suroto membenarkan adanya kerusakan di sejumlah ruas jalan. Untuk memperbaikinya, diperlukan perbaikan secara menyeluruh, dan untuk kebutuhan tersebut Pemkot Yogyakarta tidak memiliki anggaran yang cukup.

Permasalahan lainnya adalah pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta, yaitu keterbatasan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) dan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang meskipun sudah diupayakan untuk dibenahi, tetapi secara keseluruhan belum mampu diatasi, khususnya di lingkungan kelurahan, kampung, hingga rumah tangga di kota Yogyakarta. Pada sektor kesehatan, Kota Yogyakarta memiliki kemajuan lebih dalam memberikan layanan dengan adanya Jamkesmas dan menggratiskan biaya berobat. Meski demikian, di lapangan tidak semua masyarakat dapat menikmati fasilitas tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Kepala UPT Jamkesda Kota Yogyakarta, Kusminatun (2009) berkenaan dengan target capaian. "Setidaknya tahun 2010 diharapkan dapat melayani 80 persen warga. Baru pada tahun 2015 target 100 persen bagi seluruh masyarakat Yogyakarta bisa menikmati layanan kesehatan gratis."

Permasalahan lain yang tak kalah pentingnya adalah banyaknya pendatang dan semakin heterogennya masyarakat Yogyakarta baik secara nasional maupun internasional. Ini menyebabkan terjadinya asimilasi budaya, baik yang menguatkan maupun yang memudahkan nilai-nilai budaya masyarakat. Selain itu ada pula faktor tingginya kompetisi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang kemudian melahirkan masyarakat *individualistic*. Nilai-nilai sosial di masyarakat semakin bergeser. Dampaknya, silaturahmi, toleransi, empati, serta kebersamaan dalam sebuah komunitas semakin berkurang.

Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah berupaya memberikan layanan terbaik terhadap kepentingan publik, tetap saja harus mengakui bahwa masih banyak kendala dan kekurangan dalam mencapai tujuan. Tidak terkecuali yang dirasakan warga RT 70 dan RT 71, RW 19 Danunegaran, Kecamatan Mantri Jeron, Yogyakarta

ta. Selama ini, warga dibebani oleh iuran retribusi sampah dan pengolahan air limbah berdasarkan Perda No 21 tahun 2002 setiap bulan. Belum lagi iuran-iuran lainnya. Ini juga dialami oleh hampir sebagian besar masyarakat perkotaan, terutama yang hidup dengan keterbatasan ekonomi. Individualisme dan minimnya kesadaran warga dalam kehidupan bermasyarakat yang timbul dari asimilasi budaya maupun dampak dari tingginya kompetisi kehidupan warga dalam mencari mata pencaharian, juga membuat permasalahan warga kian kompleks.

Kota Yogyakarta mewakili wajah kota besar di Indonesia dalam menghadapi permasalahan yang kompleks dari sebuah konteks *urban community*. Warga kemudian terdorong untuk berinisiatif mengatasi persoalan yang terjadi untuk bersama-sama meningkatkan kemandirian dengan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat itu sendiri dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Caranya adalah dengan membentuk sebuah institusi "*jimpitan*" sebagai sebuah modal sosial. Kartasasmita (1996, 145) mengungkapkan bahwa pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, melainkan juga pranata-pranatanya. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditujukan kepada kemampuan individunya semata, namun juga institusi yang terdapat dalam masyarakat tersebut, salah satu contoh nyata adalah *jimpitan*.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait persoalan tersebut, adapun pokok pembahasan dalam penelitian ini berjudul *Modal Sosial Sebagai Solusi Mengatasi Permasalahan Masyarakat (Studi Kasus Kelompok Jimpitan pada Lingkungan RT 70 dan RT 71, RW 19 Kampung Danunegaran, Yogyakarta)*.

## II. TINJAUAN TEORI

### A. Konsep Modal Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

#### 1. Konseptualisasi Modal Sosial

Seringkali didapati keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditandai dan diukur melalui tingkat kesuksesan pembangun-

an di sektor fisik dan ekonomi. Ini berarti perhatian lebih tertuju pada modal ekonominya. Namun, satu dekade terakhir ini perhatian masyarakat dunia terhadap unsur-unsur lain yang berpengaruh besar terhadap proses keberhasilan pembangunan yang berhubungan dengan masyarakat juga meningkat, seperti halnya modal sosial. Putnam (dalam Ancok; 2003: 20-21), menunjukkan bukti bahwa pertumbuhan ekonomi sangat berkorelasi dengan kehadiran modal sosial, dan pertumbuhan tersebut memiliki ciri-ciri berikut ini:

- a. Adanya hubungan yang erat antaranggota masyarakat.
- b. Adanya pemimpin jujur dan egaliter yang memperlakukan dirinya sebagai bagian dari masyarakat, bukan sebagai penguasa.
- c. Adanya rasa saling percaya dan kerja sama di antara unsur masyarakat.

Cohen dan Prusak (dalam Ancok, 2003) menjelaskan modal sosial sebagai kumpulan dari hubungan aktif di antara manusia, rasa percaya saling pengertian, serta kesamaan nilai perilaku yang mengikat anggota dalam sebuah jaringan kerja dan komunitas yang memungkinkan adanya kerja sama. Sedangkan Menurut David L. Debertain (dalam Sunartiningih, 2004: 73), modal sosial diartikan sebagai panduan kepercayaan, norma-norma, dan jaringan kerja yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah bersama.

Menurut Bourdie (dalam Putra, 2003: 37), modal sosial sebagai sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus-menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik (atau dengan kata lain: keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif. Ditambahkan oleh Hesselbaein, *et.al.* (dalam Ancok, 2003: 12), sukses hidup dalam bermasyarakat ditentukan oleh kemampuan mem-

bangun koneksi. Dikemukakan pula oleh Field (2010: 5), bahwa masyarakat akan menggunakan jaringan mereka untuk membebaskan diri dari hambatan-hambatan lain, dan akan menggunakan modal sosial untuk mempertahankan klaim mereka di atas orang lain yang mencoba mengakses sumber daya yang sama.

Dengan besarnya modal sosial intelektual ini (dalam wujud makin banyaknya pengetahuan baru), maka akan besar kemungkinan suatu masyarakat menghasilkan inovasi, baik dalam produk inovasi yang bersifat fisik (barang dan jasa) maupun inovasi sosial (Ancok, 2003:11). Ini merupakan pendekatan baru dalam mengelola kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Selain itu Putnam (1993: 167) juga menegaskan bahwa modal sosial seperti *trust* (rasa saling percaya), *norm* (hubungan saling timbal balik), dan jaringan kerja, memudahkan terjadinya koordinasi dan kerja sama untuk kemanfaatan bersama. Modal sosial juga akan memperbesar keuntungan yang berasal dari investasi fisik dan sumber daya manusia.

## 2. Bentuk dan Elemen Dasar Modal Sosial

Dwipayana, *et.al.* (dalam Pratikno (ed.), 2001: 27), membagi bentuk modal sosial ke dalam tiga level, yaitu: 1) nilai; 2) institusi; dan 3) mekanisme. *Nilai* (budaya/persepsi) terdiri atas rasa berkewajiban, simpati, rasa percaya, resiprositas, dan pengakuan timbal balik. *Institusi* terdiri atas keterlibatan umum sebagai warga negara (*civic engagement*), asosiasi, dan jaringan. Sementara, *mekanisme* adalah kerja sama, sinergi antarkelompok.

Purwanto (dalam Bantarso, 2004: 179), mengatakan *social capital* dapat berupa organisasi sosial masyarakat, baik bersifat formal maupun informal. Organisasi sosial ini dapat menjadi wadah untuk berkumpul dan beraktivitas anggota masyarakat

seperti kelompok pengajian, organisasi arisan, organisasi pemuda, dan sebagainya. *Social capital* dapat pula berbentuk kepercayaan sosial (*social trust*) di antara anggota masyarakat, norma-norma yang berlaku di masyarakat secara timbal balik (*norm of reciprocity*), jaringan sosial (*social network*), dan sebagainya.

Dapat disimpulkan bahwa modal sosial terdiri dari tiga poin penting, yaitu kepercayaan (*trust*), norma yang berlaku secara timbal balik (*norm of reciprocity*), dan jaringan sosial (*social network*) yang berkembang di antara individu yang ada di masyarakat dan kebanyakan merupakan organisasi sosial masyarakat yang bersifat formal maupun informal.

## 3. Konseptualisasi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan yang meresume nilai-nilai sosial dalam masyarakat dengan mengedepankan peran aktif masyarakat, yang berupaya mengubah ketidakberdayaan menjadi berdaya yang mendorong keberhasilan pencapaian tujuan dalam pembangunan.

Sunartiningsih (2004: 50) mengungkapkan, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. Dikemukakan pula oleh Tjokrowinoto (2007: 36), kemandirian masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam memperbaiki diri dengan berdasarkan kekuatan sendiri, guna pemenuhan kebutuhan anggota masyarakat berdasarkan putusan bersama tanpa dipengaruhi ataupun diperintah oleh pihak lain.

Ife (1996: 82) memaknai pemberdayaan tersebut dengan membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan kete-

rampilan mereka untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka (adanya peningkatan kualitas individu masyarakat). Sementara menurut Kartasmita (1996: 144), “memberdayakan masyarakat” adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Berdasarkan berbagai pendapat yang dikemukakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses mengupayakan peningkatan kemampuan pada individu dan/atau lembaga yang berada di dalam masyarakat untuk dapat memiliki kemandirian, yang kemudian memungkinkan lepas dari ketergantungan pada pihak lain hingga ke depannya.

#### 4. Konsep Modal Sosial sebagai Pemberdayaan Masyarakat

Agar *sustainable development* dapat terselenggara, program pemberdayaan yang dilakukan harus mengadopsi keberadaan modal sosial yang berkembang di masyarakat (Suparjan dan Suyatno, 2003: 44). Pemberdayaan sejatinya tidak hanya ditujukan kepada individu personal tapi juga pada seluruh lembaga yang ada di masyarakat. Sebab, lembaga tersebut terlahir dari budaya masyarakat. Pemberdayaan yang didasarkan pada adat dan budaya ini akan menjadi lebih efektif daripada pemberdayaan dengan konsep yang baru, yang belum tentu akan sesuai dengan budaya masyarakat.

Diungkapkan Purwanto (2008: 176), keterlibatan masyarakat (partisipasi publik) sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ditambahkan Suparjan dan Suyatno (2003: 63), masyarakat akan berpartisipasi, manakala ada insentif (*reinforcement*) yang bermanfaat bagi mereka.

Dengan modal sosial inilah kemudian diupayakan penguatan pemberdayaan masyarakat yang pada dasarnya memberikan keleluasaan dalam upaya peningkatan kemandirian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan kemampuannya sendiri. Hal ini akan tercapai manakala modal sosial tersebut dapat memberikan manfaat bagiarganya.

#### B. Konsep Institusi

Berbicara mengenai kegiatan yang dikembangkan dalam sebuah komunitas tidak terlepas dari kelembagaan yang terbentuk. Tentu harus dipahami terlebih dahulu mengenai konsep institusi dan organisasi. Seringkali terjadi kerancuan akibat penyamaan arti dari keduanya atau karena dinamikanya.

Bouma (dalam Bidayati, 2008: 24), memberikan gambaran tentang konsep keduanya. Institusi menyediakan lingkungan *socio-culture* tempat organisasi beroperasi. Dalam institusi pendidikan misalnya, harapan yang ada di sana adalah sekolah dapat memberikan jaminan bahwa masuk sekolah akan memberikan pengalaman yang positif. Sedangkan sekolah adalah organisasi yang beroperasi di dalam institusi pendidikan. Dijelaskan oleh Eisenstadt (dalam Bidayati, 2008: 24) bahwa:

- a. Pada intinya institusi adalah serangkaian norma dan harapan yang mengatur interaksi aktor-aktor sosial, keluarga, kelompok, dan individu, berkaitan dengan beberapa aspek kehidupan sosial manusia.
- b. Institusi muncul dari interaksi sosial sebagai pola aksi sosial yang berlangsung dan menimbulkan norma dan ekspektasi.
- c. Norma institusi umumnya lebih *general* dari pada norma organisasi, dan bersifat transorganisasional.

North dan Williamson (dalam Bidayati, 2008: 25) mendefinisikan institusi sebagai aturan formal dan informal beserta mekanisme penegakannya yang membentuk perilaku individu dalam organisasi di masyarakat. Dicontohkan bahwa institusi formal berupa hukum dan peraturan tertulis, sedangkan institusi informal adalah nilai, etika, dan kepercayaan.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan yang menyatakan bahwa:

- a. Institusi bukanlah organisasi, dan institusi memiliki kompleksitas lebih daripada organisasi. Hal ini disebabkan institusilah yang menyediakan *socio-culture* bagi beroperasinya suatu organisasi.
- b. Institusi terdiri dari institusi formal dan institusi nonformal, termasuk di dalam institusi formal adalah hukum, sedangkan institusi informal meliputi antara lain, etika, norma, harapan, kepercayaan, dan sebagainya.

Hubungan antara institusi formal dengan informal banyak diuraikan dalam studi pengembangan kelembagaan, salah satunya adalah perspektif interaksi. Dalam perspektif ini institusi informal mempunyai peran dan sifat *complementary* dan memiliki fungsi "*filling the gap*". Dengan kata lain, institusi informal berfungsi mengisi kesenjangan atau kekosongan yang ditinggalkan oleh institusi formal, yaitu dengan membantu memecahkan persoalan atau kondisi darurat yang tidak diatur oleh institusi formal (Purwanto, 2008).

### C. Pengembangan Kelembagaan dalam Konteks *Good Governance*

Tidak tercapainya tujuan pembangunan disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya tidak tepatnya tujuan dan sasaran pembangunan. Faktor ini seringkali disinyalir sebagai akibat dari ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola pemerintahan secara baik. Hal ini

pun tidak lepas dari perilaku pemerintah yang seringkali menjadi *single actor*. Atas dasar itulah maka muncul cara pandang baru berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu *good governance* (proses pemerintahan yang baik) yang menggantikan *government* (pemerintah).

Krisdyatmiko (dalam Sunartiningsih; 2004) menyatakan bahwa *governance* tidak sama dengan *government* dalam arti lembaga, namun *governance* adalah proses kepemimpinan. Dalam arti luas, *governance* adalah bentuk interaksi atau jaringan antara negara dengan aktor-aktor di luar pemerintah. Menurut Dwiyanto (2008: 19), *good governance* adalah upaya penyelenggaraan pemerintahan suatu negara yang di dalamnya terdapat tata pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan manajemen pemerintahan tersebut mengutamakan pencapaian tujuan bernegara yaitu kesejahteraan masyarakat, dengan tetap memberikan ruang atas keterlibatan pelaku lain (masyarakat sipil dan mekanisme pasar) sebagai aktor yang juga memengaruhi dan mewarnai pemerintahan.

Dapat dipahami bahwa *government* yang selama ini begitu dominan beralih ke arah *governance*, yang memiliki makna bahwa telah terjadi perubahan paradigma pada penyelenggaraan pemerintahan. Jika sebelumnya pemerintah selalu menjadi satu-satunya aktor (lembaga) dan pelopor dalam proses pembangunan, kini harus berubah dan berupaya lebih banyak melibatkan aktor di luar pemerintah agar tercapai tujuan pembangunan. *Good governance* memberikan ruang lebih pada dunia usaha dan masyarakat serta menempatkan keduanya sebagai mitra. Peran masyarakat secara individu maupun kelembagaan harus dioptimalkan dengan menguatkan kemandiriannya sebagai salah satu pilar utama *good governance*.



#### D. Konsep Nilai Publik, Norma, dan Budaya

Benington (2011: 42-51) menyatakan bahwa nilai-nilai publik adalah hal yang menjadi nilai di masyarakat serta apa yang menambahkan nilai-nilai tersebut berkembang dalam masyarakat. Nilai publik mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai suatu alternatif bagi kedua teori yaitu teori rasional/pilihan publik dan teori masyarakat yang baik. Di dalamnya terdapat suatu kerangka konseptual untuk menginformasikan dan mengilhami peningkatan dan perubahan dalam pelayanan masyarakat. Nilai-nilai publik merupakan kerangka konseptual tentang persaingan keinginan (minat) dan nilai-nilai yang dinyatakan dan diperdebatkan, dengan mempertimbangkan persaingan keanekaragaman dan identitas di dalam sebuah pemahaman yang dirundingkan untuk menjadi bagian dari masyarakat luas.

Nilai-nilai publik menurut Ulrich Beck (dalam Benington dan Moore (ed.), 2011: 32) tidak terlepas dari sikap individu, rumah tangga, dan masyarakat dengan tantangan bagaimana cara mereka menyesuaikan diri agar dapat bertahan hidup dan terus tumbuh. Sedangkan norma adalah ukuran untuk menentukan sesuatu (Suharso dan Retnoringih A., 2009: 338). Kemudian ditambahkan Komaruddin (dalam Winarto, 2005: 9), norma merupakan suatu standar produk, pekerjaan, atau waktu yang diinginkan dan biasanya ditarik/disepakati dari hasil rata-rata atau median dari kelompok besar.

Sementara itu, kebudayaan terdiri dari tiga wujud yaitu: 1) sebagai ide; 2) sebagai aktivitas; dan 3) sebagai benda hasil karya manusia. Bila dilihat dari wujud aktivitasnya maka budaya dapat dijabarkan sebagai sebuah aktivitas manusia-manusia yang berinteraksi, berhubungan, bergaul satu dengan lainnya dari waktu ke waktu, dan selalu mengikuti pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2002: 6).

Dari uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai publik merupakan hasil/cipta karya dari satu atau beberapa in-

dividu ataupun dari kelompok-kelompok di dalam maupun di luar masyarakat. Nilai dari luar timbul akibat adanya persaingan keinginan dalam menentukan nilai-nilai yang berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat dan disepakati serta diterima oleh masyarakat dengan tujuan meningkatkan perbaikan bagi kondisi masyarakat saat ini maupun ke depannya. Ini kemudian menjadi pola serta adat perilaku masyarakat dalam menjalani kehidupan, sehingga berbagai tantangan dapat dilalui dengan baik. Nilai-nilai, norma, dan budaya dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan masyarakat tersebut hingga masa yang akan datang.

#### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan untuk memahami relasi-relasi sosial yang berkembang pada masyarakat kampung Danunegaran khususnya pada kelompok *jimpitan* RT 70 dan RT 71, RW 19. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran *jimpitan* guna menghimpun modal sosial dalam upayanya memberikan *panacea* terhadap permasalahan yang terjadi pada lingkungan kelompok *jimpitan* tersebut.

Penelitian yang dilakukan menggunakan desain penelitian kualitatif yang bersifat induktif, dengan memberikan gambaran mengenai berbagai fenomena, menjelaskan hubungan, mendapatkan makna dan implikasi dari suatu permasalahan yang diteliti tanpa mementingkan pengujian suatu teori. Menurut Bungin (2010: 24), penelitian kualitatif yang menggunakan model induksi adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan tak perlu tahu tentang suatu teori, akan tetapi langsung ke lapangan.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui wawancara mendalam, survei, observasi, serta dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan untuk mengubah data mentah yang diperoleh di lapangan menjadi hal yang berguna untuk menjawab permasalahan dalam penelitian dengan tahapan: *Reduction, Data Display, Conclusion Drawing/Verification*.

## A. Lokasi Penelitian

### 1. Kota Yogyakarta

Yogyakarta terletak di lembah tiga sungai, yaitu Sungai Winongo, Sungai Code (yang membelah kota dan kebudayaan menjadi dua), dan Sungai Gajah Wong. Kota ini berjarak 600 km dari Jakarta, 116 km dari Semarang, dan 65 km dari Surakarta, terletak pada jalur persimpangan Bandung-Semarang-Surabaya-Pacitan. Penduduk Kota Yogyakarta berjumlah 388.088 jiwa dengan perbandingan laki-laki dan perempuan yang hampir setara (berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik/BPS tahun 2010). Kota Yogyakarta yang merupakan Pemerintah Kota/Kabupaten terkecil pada Provinsi DIY ini memiliki luas 32,5 km<sup>2</sup> atau 1,025 persen dari luas keseluruhan wilayah Provinsi DIY. Dengan luas yang hanya 3.250 hektar tersebut, Kota Yogyakarta terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT. RT 70 dan RT 71, RW 19 Kampung Danunegaran, Kelurahan Mantri Jeron, Kecamatan Mantri Jeron adalah salah satunya.

### 2. RT 70 dan RT 71, RW 19 Kampung Danunegaran

Kampung Danunegaran terletak di sebelah selatan dari pojok benteng timur Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan hanya 150 meter letaknya dari perempatan jalan pojok benteng tersebut. Kampung ini berada dalam lingkungan Kelurahan Mantri Jeron, Kecamatan Mantri Jeron, Kota Yogyakarta.

Hubungan sosial kemasyarakatan antarwarga yang terjalin di kampung ini secara umum sudah baik. Tingkat pendidikan warga RT cukup mendukung tumbuh dan berkembangnya modal sosial. Menurut Ancok (2003: 29), kelahiran modal sosial sangat ditentukan oleh pendidikan di sekolah dan pendidikan dalam keluarga. Bila

melihat pekerjaan warga RT 70 dan RT 71, sebenarnya secara ekonomi memiliki kemampuan yang cukup. Dari 42 KK yang berdomisili pada kedua RT tersebut terdapat jumlah 1 KK prasejahtera non-alek (alasan ekonomi), 4 KK sejahtera I non-alek, dan 3 KK sejahtera I alek (berdasarkan data Program Kesejahteraan Keluarga/PKK RW 19 Danunegaran yang diambil oleh Petugas Sosial Mandiri/PSM). Akan tetapi, jika diamati lebih cermat, sebenarnya masih lebih banyak warga yang memiliki kesulitan ekonomi daripada yang tampil dalam data resmi oleh PSM. Keterangan ini didapat dari informasi yang disampaikan oleh Tuti Sukastini (istri Ketua RW 19) yang juga menjabat sebagai Ketua Pokja II bidang pendidikan di PKK Kelurahan Mantri Jeron.

Meski demikian, komunitas ini sesungguhnya dapat menjadi sebuah lahan yang subur bagi tumbuh-kembangnya modal sosial, seperti halnya *jimpitan* yang mengedepankan silaturahmi dan kegotong-royongan dalam memikul beban secara bersama-sama. Mengapa demikian?

Selain tingkat pendidikan yang cukup, warga juga telah sangat familiar dengan keberadaan modal sosial yang tumbuh di Danunegaran. Modal sosial ini merupakan pendidikan bagi warganya, sehingga telah membentuk beberapa nilai yang kemudian menjadi norma yang berlaku dalam kegiatan *jimpitan*.

*Jimpitan* menjadi menarik, karena aktivitas maupun kegunaan institusi ini mampu mempersatukan warga yang memiliki multiproblem, baik secara personal maupun secara kolektif tanpa mengenal batasan agama, ekonomi, suku, warga asli maupun pendatang. Ini berbeda jika dibandingkan dengan sedangkan kegiatan lainnya seperti pengajian, arisan warga, atau koperasi simpan pinjam. Kegiatan-kegiatan itu memang memiliki manfaat serupa, namun memiliki *frame* entitas yang membatasi.

#### IV. HASIL ANALISIS DAN DISKUSI

##### A. Terbentuknya Institusi Jimpitan Sebagai Solusi Persoalan Warga

*Jimpitan* yang berasal dari kata “jumputan” atau “menjumput”, memiliki arti kata memungut. Praktik *jimpitan* adalah mengambil sumbangan berupa beras yang dikumpulkan secara beramai-ramai<sup>1</sup>. Searah dengan perkembangan jaman, saat ini, kegiatan *jimpitan* berubah. Uang menjadi objek yang dikumpulkan sebagai pengganti beras sebagaimana dilakukan oleh masyarakat sebelumnya. Alasannya adalah agar lebih mudah dalam pengelolaan dan pemanfaatannya.

*Jimpitan* yang dilakukan warga RW 19 sebelumnya dilakukan hanya sebulan sekali, dengan beras sebagai objek yang dikumpulkan. Pada saat rapat RW dan RT, beras itu kemudian ditawarkan dan dijual kepada warga yang tidak mampu, tentu dengan harga yang relatif lebih murah dari harga pasar. Namun demikian, prosedurnya terbilang lebih rumit sehingga menjadi tidak efektif, selain manfaat yang dirasakan hanya terbatas pada sebagian kecil warga saja. Akibatnya, kontribusi *jimpitan* beras tidak memberikan pengaruh yang signifikan dan menyebabkan sebagian besar warga meninggalkannya.

Di sisi lain, warga RT 70 dan RT 71, RW 19 Danunegaran dihadapkan pada berbagai persoalan, di antaranya masalah tidak terpenuhinya kebutuhan layanan publik akibat absennya negara. Pembiayaan perbaikan dan pemeliharaan jalan kampung, penerangan jalan, drainase/saluran pengolahan air limbah, dan pengelolaan sampah, semua dibebankan pada warga, sementara kemampuan warga terbatas.

Masalah lain adalah banyaknya warga pendatang yang berdomisili di lingkungan ini. Selama ini warga pendatang tidak memiliki wadah untuk berinteraksi dengan warga asli. Modal sosial yang telah terbentuk pada umumnya masih membawa entitas yang tidak

dapat diikuti oleh seluruh warga, misal faktor agama dan status kependudukan.

Tingkat kepatuhan warga terhadap aturan main dalam sebuah komunitas juga menjadi permasalahan bagi hampir seluruh masyarakat perkotaan (*urban community*), dan menuntut warga/masyarakat untuk selalu berupaya mencari solusi atas permasalahan di lingkungannya sendiri.

Warga RT 70 dan RT 71, RW 19 Danunegaran kemudian sepakat untuk merevitalisasi institusi *jimpitan*. Institusi ini bersifat informal dengan aturan main yang dijalankan berdasarkan kesepakatan warga. Tidak ada struktur organisasi di dalamnya, kegiatannya pun dilakukan oleh seluruh warga. Pengelolaan dana *jimpitan* dikoordinir oleh pengelola, yang bila dilihat perannya terbagi menjadi: 1) koordinator pengelola *jimpitan*; 2) bagian operasional lapangan; serta 3) bagian pengawasan.

Institusi *jimpitan* ini dapat terbentuk dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Dibutuhkan aktor yang memiliki kemampuan *leadership* yang baik, kemauan yang kuat, dan berpengetahuan berkenaan dengan kegiatan yang dibentuk, serta manfaat yang diperoleh.
- b. Adanya kesetaraan pada seluruh anggota/warga yang terlibat.
- c. Wadah memenuhi kepentingan seluruh warga bukan pada sekelompok/golongan warga tertentu
- d. Adanya bentuk modal sosial yang pernah tumbuh.
- e. Kemauan warga dalam membentuk dan berpartisipasi melaksanakan *jimpitan*.

Agar pengelolaan *jimpitan* dapat berjalan, terdapat aturan main operasional yang ditetapkan dari kesepakatan seluruh warga. Aturan itu berupa kewajiban dan hak pada seluruh aktor yang berperan sebagai:

<sup>1</sup> <http://www.artikata.com/arti-366722-jimpitan.html>, definisi ‘jimpitan’, diunduh pada tanggal 11 Juni 2011.

- a. Penjimpit sekaligus peronda, dilakukan bergiliran setiap malam berdasarkan jadwal yang ditetapkan. Donatur memberikan iuran minimal Rp300,- per hari per KK dan turut melakukan pengelolaan dan pengawasan.
- b. Pengelola yang melakukan perannya mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengelolaan, operasional, dan pengawasan.
- c. Pengurus RT/RW dan tokoh masyarakat yang memberikan motivasi, sebagai penengah dan pengontrol pada kegiatan *jimpitan*.

Pelaksanaan *jimpitan* yang dilakukan berdasarkan kewajiban warga dalam menjalankan perannya secara umum telah berjalan baik. Dalam waktu tiga tahun setelah revitalisasi dilakukan, dana *jimpitan* yang terkumpul selalu mencapai 135% dari yang seharusnya diperoleh dengan iuran minimal.

Hak adalah sebuah kekuasaan yang benar dan sah untuk menuntut atau mendapatkan sesuatu, baik itu bagi warga secara individu maupun secara kolektif. Hak yang dimaksud adalah kesempatan dan kesetaraan warga mendapatkan manfaat dari kegiatan *jimpitan* yang ditentukan berdasarkan keaktifan warga dalam berpartisipasi di kegiatan *jimpitan*. Realitas di lapangan pada kelompok *jimpitan* tersebut bahwa retribusi sampah dan retribusi pengelolaan air limbah serta biaya-biaya kegiatan lainnya seperti Syawalan dan Peringatan 17 Agustus yang selama ini dibebankan pada warga, telah ditanggulangi oleh dana hasil *jimpitan* secara rutin. Sedangkan untuk perbaikan lingkungan, tergantung tingkat kerusakan dan berapa warga yang menggunakan serta keaktifan partisipasi warga dalam melaksanakan perannya pada kegiatan *jimpitan*.

Berdasarkan kesepakatan warga, dana yang digunakan bagi kepentingan publik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Permasalahan yang apabila tidak diselesaikan akan berdampak bagi sebagian besar masyarakat (minimal 10 KK), baik yang harus segera diselesaikan maupun yang tidak harus segera diselesaikan.
- b. Permasalahan yang bersifat pribadi namun membutuhkan bantuan dan dukungan dari warga terutama dukungan materi, moril, dan kebersamaan sebagai saudara sesama warga RT 70 dan RT 71.
- c. Permasalahan atau kegiatan yang memang telah menjadi kesepakatan warga untuk ditanggulangi secara bersama-sama melalui pendanaan *jimpitan*.

Guna memudahkan pelaksanaannya, pelaksanaan kegiatan *jimpitan* ini diatur dengan mekanisme operasional *jimpitan*, mekanisme identifikasi masalah, dan mekanisme penggunaan/pemanfaatan hasil *jimpitan*. Mekanisme ini telah dilakukan dengan baik sesuai aturan yang ditetapkan, terutama pemberdayaan warga yang terlibat di dalamnya berkenaan dengan penyampaian aspirasi dan pengambilan keputusan untuk segala kegiatan *jimpitan*. Seluruh proses pengawasan dalam memajukan kegiatan *jimpitan* dilakukan berdasarkan musyawarah warga. Kendala yang terjadi hadir dari keinginan warga dalam berpartisipasi, khususnya pada pengawasan dan dalam menyampaikan partisipasi yang lebih ditingkatkan lagi.

## **B. *Jimpitan*, Institusi Modal Sosial Solusi Bagi Permasalahan Masyarakat**

### ***Bentuk Modal Sosial***

#### **a. Kepercayaan Sosial (*Social Trust*)**

Kepercayaan sosial yang dimaksud adalah sikap saling percaya yang dibangun dan terjadi antara warga, pengelola *jimpitan*, dan para tokoh masyarakat maupun pengurus RT/RW yang berada pada lingkungan kelompok *jimpitan* RT 70 dan RT 71, RW

19 Danunegaran dalam pelaksanaan institusi *jimpitan*. Pengelolaan *jimpitan* yang memberikan keleluasaan pada seluruh warga dalam menjalankan peran pada kegiatan *jimpitan* adalah sebuah upaya pengelola dalam membangun kepercayaan yang telah terjalin sejak awal. Untuk menunjang peningkatan dalam membangun kepercayaan pada seluruh *stakeholders*, warga perlu diyakinkan mengenai betapa pentingnya *jimpitan* bagi mereka.

Pengelola *jimpitan* dan pengurus RT/RW juga perlu memberikan informasi berkenaan dengan manfaat dan pentingnya bagi warga. Ini juga sekaligus menjadi upaya menjaga arah kegiatan *jimpitan* agar tetap dalam koridor yang telah disepakati, menyosialisasikan betapa pentingnya *jimpitan* bagi warga tanpa melalaikan fungsi pengawasan yang diembannya, serta menjadi penyeimbang di kala terjadi dominasi kepentingan dalam pemanfaatan *jimpitan*.

Kepercayaan terhadap masing-masing aktor tentu saja tidak begitu saja terbentuk, namun melalui tahapan-tahapan yang telah dijalani disertai perbaikan selama perjalanan yang diawali pada saat revitalisasi *jimpitan* hingga saat ini. Salah satu barometer terpenting bagi tercapainya rasa saling percaya seluruh *stakeholders* pada kegiatan *jimpitan* ini adalah kemampuan institusi memberikan manfaat bagi seluruh warga.

Dengan demikian, kepercayaan sosial yang diupayakan terus terbangun dan tumbuh dalam institusi *jimpitan* ini dapat tercipta pada saat seluruh *stakeholders* mampu menciptakan kondisi institusi tersebut sebagai berikut;

- a. Kesetaraan peran pada setiap aktor pelaku *jimpitan* serta meratanya distribusi manfaat berdasarkan partisipasi yang dibangun warga.
- b. Tidak adanya pemaksaan kehendak oleh seorang atau beberapa orang yang mengutamakan kepentingan individu

atau kepentingan kelompok yang diwakilinya akan tetapi justru selalu berpikir untuk warga dan untuk kepentingan bersama.

- c. Kepatuhan aktor yang terlibat dalam menjalankan aturan main yang disepakati.
- d. Kejujuran dan amanah terhadap pelaksanaan kegiatan *jimpitan* oleh seluruh warga terhadap peran yang diembannya.

## **b. Norma (Norm)**

Norma yang dimaksud di sini adalah seluruh aturan main pada institusi *jimpitan* sebagai modal sosial yang tentu saja berasal dari nilai-nilai masyarakat dan menjadi kesepakatan bersama warga sebagai sebuah pedoman yang dilanjutkan dengan perilaku aktor yang berperan dan berinteraksi. Semua itu dapat diterima oleh warga, tidak terkecuali dengan institusi *jimpitan* yang telah disepakati sebagai kegiatan seluruh warga RT 70 dan RT 71, RW 19 Danunegaran. Secara otomatis, *jimpitan* telah menjadi sebuah pedoman warga dan harus dilanjutkan dengan aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama.

Norma yang terbangun dalam *jimpitan* ini adalah sebuah norma informal yang kemudian dipedomani sebagai aturan main yang dijalankan dalam institusi *jimpitan* secara fleksibel. Tingkat kepatuhan seluruh *stakeholders* terhadap peran yang telah diembannya dengan sebuah ketentuan norma ini telah berjalan dengan baik pada kelompok *jimpitan* ini.

## **c. Jaringan Sosial (Social Network)**

Jaringan sosial pada kegiatan *jimpitan* ini adalah sebuah hubungan yang terjadi di saat warga pada sebuah kelompok *jimpitan* berinteraksi antara satu dengan lainnya. Bila dalam hubungan warga, pengelola, dan pengurus RT/RW sebagai aktor

dengan peran berbeda saling bekerja sama, memiliki kesamaan nilai atas kepentingan bersama, serta memberikan kebebasan berinovasi, maka keberhasilan institusi *jimpitan* dalam menjalankan fungsinya akan tercapai.

Dalam penelitian ini, hal tersebut telah terbentuk dalam hubungan yang terjalin dengan baik dari hubungan internal pengelola *jimpitan*, antara warga dengan pengelola serta tokoh masyarakat. Selain itu, ditunjang pula oleh intensitas pertemuan dan penyampaian aspirasi yang rutin dilakukan setiap bulannya. Bila sewaktu-waktu dibutuhkan pertemuan yang mendesak, maka kapan saja dapat dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas masing-masing. Partisipasi seluruh aktor pada seluruh kegiatan *jimpitan* juga berperan bahkan menjadi barometer terbentuk dan terjalannya institusi *jimpitan* sebagai modal sosial dengan baik adalah manfaat yang dapat dirasakan oleh warga dari kegiatan *jimpitan* ini.

### C. Kontribusi Modal Sosial Pada Pengelolaan dan Manfaat Institusi *Jimpitan*

Kontribusi institusi *jimpitan* sebagai modal sosial dalam upaya menyelesaikan persoalan warga yang telah dilaksanakan selama ini pada kelompok RT 70 dan RT 71, RW 19 Danune-

garan selama ini sudah berjalan dengan baik. Ini dilihat dari sisi perencanaan, pengelolaan, hingga pemanfaatan dan pengawasan yang sesuai dengan *rule of the game* serta *reward* dan *punishment* atas kesepakatan serta kepatuhan warga, berdasarkan kepercayaan, norma, dan jaringan sosial yang merupakan bentuk dari modal sosial pada kelompok *jimpitan*.

Hal yang perlu menjadi perhatian serta butuh ditingkatkan adalah pada perencanaan kegiatan yang masih belum dilakukan dan sekadar berdasarkan rutinitas kegiatan pada tahun sebelumnya. Bila ada usulan kegiatan baru biasanya disampaikan secara spontan oleh warga, pengurus RT/RW, maupun pengelola untuk kemudian dimusyawarahkan.

Terdapat pula beberapa permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan operasional *jimpitan*, antara lain: 1) faktor alam (cuaca musim hujan dan bencana alam); 2) hari besar keagamaan yang menyebabkan warga tidak berada di tempat; 3) kesadaran warga rendah; 4) aktivitas warga yang berbenturan dengan jadwal pengambilan *jimpitan*; 5) faktor kelalaian (keletihan dan kesibukan yang menyebabkan warga lupa); 6) warga yang tidak jujur dalam melaksanakan kegiatan *jimpitan*; serta 7) *conflict interest* yang menyebabkan perpecahan bahkan bisa menghentikan aktivitas institusi *jimpitan*.

Tabel 1 Manfaat Kegiatan *Jimpitan*

Manfaat yang Diperoleh Dari Kegiatan <i>Jimpitan</i>				
No	Uraian	Jumlah Kegiatan yang Dilakukan Per Tahun		
		2009	2010	2011
1	Tali Asih bagi warga yang sakit	8	7	9
2	Tali asih bagi warga yang meninggal dunia	2	4	0
3	Retribusi sampah	7	14	10
4	Retribusi Pengolahan limbah	5	9	10
5	Perbaikan Lingkungan	1	2	5
6	Perayaan Hari besar Agama dan Nasional	2	1	1
7	Inventaris Kelompok <i>jimpitan</i> RT 70-71	0	6	3
8	Lain-lain	0	1	2

*Jimpitan* memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menyelesaikan persoalan warga di perkotaan (*urban community*) yang selama ini dialami dan belum/tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme negara/pemerintah. Sebelum adanya institusi *jimpitan* ini, permasalahan tersebut telah menjadi beban bagi warga RT 70 dan RT 71, RW 19 Danunegaran Yogyakarta. Kehadiran *jimpitan* memberikan manfaat nyata bagi warga, bahkan telah berhasil melampaui ekspektasi warga, seperti dijelaskan dalam Tabel 1.

Kontribusi institusi *jimpitan* tidak hanya berupa pemenuhan kebutuhan/kepentingan fisik, akan tetapi juga makna kegiatan yang menjadi pokok dasar pemikiran sehingga berpengaruh terhadap nilai-nilai. Ini bersentuhan dengan perubahan perilaku serta mampu meningkatkan nilai-nilai positif yang berkembang dalam kehidupan warga, berdasarkan beberapa prinsip *jimpitan*, yaitu: silaturahmi, gotong-royong, toleransi, kejujuran, keadilan, kemandirian, serta keamanan.

Institusi *jimpitan* pada kelompok RT 70 dan RT 71 ini berhasil menjalankan fungsinya. Pada awalnya, *jimpitan* dimaksudkan untuk mempererat tali silaturahmi (*bonding*) warganya tanpa batasan-batasan entitas tertentu. Kini *jimpitan* bahkan mampu menjembatani peningkatan silaturahmi serta persatuan dan kesatuan yang telah terbentuk oleh modal sosial lainnya pada *frame* entitas tertentu. Selain itu, pelaksanaan *jimpitan* dapat dilihat sebagai sebuah miniatur *good governance* yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas warga dan mampu menjadi sebuah *socio-empowerment public service* karena kemampuannya meningkatkan pemberdayaan warga terhadap persoalan yang sebelumnya tidak dapat diselesaikan oleh mekanisme negara/pemerintah. Lebih khusus lagi pada problematika *urban community* berupa solusi bagi permasalahan berkenaan perbaikan sarana jalan dan penerangan jalan kampung, pengelolaan sampah dan air limbah serta permasalahan drainase dan sanitasi, beserta biaya-biaya yang timbul dari kegiatan tersebut.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *jimpitan* sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan masyarakat, khususnya pada kelompok *jimpitan* RT 70 dan RT 71, RW 19 pada Kampung Danunegaran Kecamatan Mantri Jeron, Kota Yogyakarta, maka dapat disimpulkan beberapa hal. *Pertama*, persoalan yang kerap terjadi dan dialami pada warga RT 70 dan RT 71, RW 19 Danunegaran adalah tidak adanya perbaikan dan pemeliharaan jalan kampung, penerangan jalan, juga pemeliharaan dan perbaikan sarana drainase. Persoalan ini muncul akibat dari lemahnya fungsi pemerintah dalam memberikan dan memenuhi kebutuhan layanan publik, dengan alasan keterbatasan anggaran. Permasalahan lain adalah akses memperoleh layanan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan warga, ditambah retribusi yang harus dibayar oleh warga, sementara sebagian besar penduduknya merupakan warga dengan ekonomi lemah. Akibatnya, persoalan ini menjadi berlarut-larut.

*Kedua*, lemahnya kemampuan pemerintah dalam pemenuhan dan pemeliharaan sarana layanan publik serta rendahnya tingkat perekonomian warga menyebabkan warga RT 70 dan RT 71, RW 19 Danunegaran memutuskan untuk membentuk modal sosial. Institusi *jimpitan* dianggap paling tepat dan memiliki kelebihan, jika dibandingkan dengan berbagai modal sosial lain yang terbentuk pada komunitas.

*Ketiga*, kelebihan institusi *jimpitan* adalah pada awalnya, keberadaan *jimpitan* ditujukan sebagai pengikat tali silaturahmi (*bonding*) warga, ternyata kemudian justru memberikan manfaat yang jauh lebih besar. *Jimpitan* berhasil menjadi jembatan bagi modal sosial lainnya (*bridging social capital*) yaitu peningkatan tali silaturahmi yang berkembang di masyarakat. Sebelumnya, modal sosial lainnya terbatas pada *frame* entitasnya, kemudian justru lebih diperkuat lagi oleh fungsi *jimpitan* tanpa ada *frame* entitas yang diung.

## B. Saran

Agar pelaksanaan jimpitan sebagai modal sosial sebagai solusi mengatasi permasalahan masyarakat dapat lebih bermanfaat bagi warga, maka perlu diadakan perbaikan-perbaikan.

Institusi jimpitan yang telah terbentuk sebaiknya tetap dalam bentuk informal yang fleksibel namun terkontrol, yang diikuti dengan penguatan proses perencanaan yang lebih baik. Warga harus menjalankan seluruh aturan main (*rule of the game*) dalam pelaksanaan jimpitan termasuk *reward* dan *punishment* yang telah disepakati, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai yang berlaku. Aturan ini perlu disosialisasikan agar dapat diketahui dan dipatuhi.

Fungsi kontrol perlu ditingkatkan, terutama melalui partisipasi warga. Begitu pula dengan transparansi. Perlu ada laporan tertulis bulanan berkenaan dengan pengelolaan dan pemanfaatan *jimpitan*. Laporan ini minimal ditempel pada papan pengumuman sehingga seluruh warga dapat mengakses informasi perkembangan *jimpitan* dengan mudah.

*Jimpitan* yang telah berhasil memberikan manfaat bagi warga hendaknya ditingkatkan lagi atas manfaatnya hingga pada perbaikan ekonomi warganya. Ini bisa dilakukan dengan membentuk koperasi atau Baitul Mal wa Tamwil, bisa juga bekerja sama dengan modal sosial lainnya, yaitu kelompok simpan pinjam yang sudah ada.

Untuk lebih dapat menyerap aspirasi lebih baik lagi, maka diperlukan kotak saran sebagai media penyampaian aspirasi terutama bagi perbaikan dan kemajuan kegiatan *jimpitan*. Perhatian masyarakat pun perlu ditingkatkan lagi sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan yang dapat menyebabkan mandulnya fungsi *jimpitan*, bahkan berdampak pada bubarinya keberadaan *jimpitan*. Sebagai contoh, meningkatkan komunikasi terutama pada warga yang selama ini belum begitu aktif dalam kegiatan *jimpitan*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, D. 2003. *Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat*. UGM. Yogyakarta.
- Artikata. 2011. Kamus Definisi. <http://www.artikata.com/arti-366722-jimpitan.html>. Diakses 11 Juni 2011.
- Bantarso, A. B. 2004. *Kampus Biru Menggugat: Bunga Rampai Tulisan Alumni FISIPOL UGM (Seri I)*. KA. FISIPOL GAMA. Jakarta.
- Benington, J., dan Moore, MH (ed). 2011. *Public Value: Theory and Practice*. Palgrave Macmillan. New York.
- Bidayati, A. 2008. Dinamika Modal Sosial Pada Lembaga Keuangan Mikro (Studi di BMT Artha Amanah). *Tesis*. Program Magister Administrasi Publik FISIPOL UGM. Yogyakarta.
- Bungin, M. B. 2010. *Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Dwiyanto, A. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Field, J. 2010. *Modal Sosial*. Kreasi Wacana. Bantul
- Harian *Kedaulatan Rakyat*, edisi 3 Januari 2012.



- Ife, J. W. 1996. *Community Development Creating Community Alternative Vision: Analysis and Practice*. Longman. Melbourne, Australia.
- Kartasasmita, G. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. PT. Pustaka CIDESINDO. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 2001. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kusminatun. 2009. Dana Jamkesda di Yogyakarta Tak Terserap Maksimal. *www.republika.co.id*. Diakses 28 Oktober 2011.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2002 tentang *Retribusi Kebersihan*.
- Pratikno (ed.). 2001. *Merajut Modal Sosial untuk Perdamaian dan Integrasi Sosial*. Fisipol UGM. Yogyakarta.
- Purwanto, E.A. 2008. Pelayanan Publik Partisipatif. Dalam Agus Dwiyanto (ed.). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Putnam, R.D. 1993. *Marking Democracy Work: Civil Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press. USA.
- Putra, I.M.K. 2008. Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pakraman (Studi Kasus Pengelolaan LPD Desa Pakraman Batuaji Kawan Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali). *Tesis*. Program Magister Administrasi Publik FISIPOL UGM. Yogyakarta.
- Suharso dan Retnoningsih. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. CV. Widya Karya. Semarang.
- Suhartono. 2008. Dewan Minta Tingkatkan Biaya Pemeliharaan Jalan. *www.kr.co.id*. Diakses 11 November 2011.
- Sunartiningsih, A. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Aditya Media Bekerja sama dengan Jurusan Sosiatri Fisipol UGM. Yogyakarta.
- Suparjan dan Suyatno, H. 2003. *Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Aditya Media. Yogyakarta.
- Suroto. 2011. Hujan, Jalan Jogja Tak Aman. *www.seputar\_indonesia.com*. Diakses 11 November 2011.
- Tjokrowinoto, M. 2007. *Pembangunan Dilemma dan Tantangan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Winarto, P. 2005. *Penyusunan, Norma, Standar, dan Prosedur Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil*. Pusat penelitian dan Pengembangan Badan Kepegawaian Negara. Jakarta.
- Wikipedia. 2011. Kota Yogyakarta. *www.id.wikipedia.org*. Diakses 11 November 2011.



# PANDUAN UNTUK PENULIS

Redaksi Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP) mengundang Anda untuk mengirimkan tulisan dan dimuat di jurnal ini. Ketentuan penulisan naskah adalah sebagai berikut.

## A. Tujuan dan Ruang Lingkup Jurnal

Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik adalah suatu jurnal multidisiplin berskala nasional yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu administrasi publik. Secara khusus JKAP menaruh perhatian, namun tidak hanya terbatas, pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu kebijakan dan administrasi publik, administrasi pembangunan, otonomi daerah, birokrasi dan aparatur negara, desentralisasi, ilmu ekonomi dan studi pembangunan, manajemen publik, kebijakan dan pemerintahan, serta ilmu sosial lain mencakup ilmu kesehatan masyarakat, politik fiskal, dan perencanaan wilayah. Tujuan diterbitkannya jurnal ini adalah untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran konseptual maupun hasil-hasil penelitian yang telah dicapai di bidang kebijakan dan administrasi publik.

## B. Ketentuan Umum Naskah

1. Naskah dapat berupa hasil penelitian, artikel berisi pemikiran dan penilaian terhadap buku, yang belum dan tidak akan dipublikasikan dalam media cetak lain.
2. Naskah harus asli, bukan jiplakan, dan tidak mengandung unsur plagiarisme. Dewan Redaksi akan langsung menolak naskah yang berindikasi plagiat.
3. Penulis memberikan informasi berupa nomor telepon, nama instansi, alamat instansi, dan alamat e-mail.

## C. Ketentuan Penulisan

1. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris baku dengan abstrak dalam Bahasa Inggris DAN Bahasa Indonesia. Abstrak tidak lebih dari 250 kata dengan disertai 3-5 istilah kunci (*keyword*).
2. Naskah berupa ketikan asli atau *soft copy* dengan panjang antara 15 sampai 25 halaman. Diketik di kertas ukuran A4, Times New Roman font 12, spasi ganda.
3. Judul diusahakan cukup informatif dan tidak terlalu panjang (maksimal 12 kata, ditulis dengan huruf kapital seluruhnya, peletakkan *center* dan ditebalkan.)
4. Naskah ditulis dengan sistematika jelas, penomoran menggunakan huruf Rowami dengan ketentuan sbb.:
  - a. Naskah yang berasal dari hasil penelitian mengikuti sistematika: Pendahuluan, Tinjauan Teori, Metode Penelitian, Hasil Analisis dan Diskusi, Penutup.
  - b. Naskah yang berupa wacana/pemikiran kritis mengikuti sistematika: Pendahuluan, Subjudul (subjudul 1, subjudul 2, dst.), Penutup.

- c. Naskah ditulis dengan menggunakan pedoman ilmiah (baik dalam hal judul karangan, judul tabel, daftar pustaka, kutipan, dll), mengikuti panduan pengutipan yang benar.
- d. Penulisan daftar pustaka mengikuti aturan APA-Harvard, ditulis dalam urutan abjad secara kronologis:
- i. Untuk buku: nama pengarang. tahun terbit. *judul*. edisi. nama penerbit. tempat terbit. Contoh:  
Hicman, G.R dan Lee, D.S. 2001. *Managing Human Resources in The Public Sectors: A Share Responsibility*. Harcourt Collage Publisher. Forth Worth.
  - ii. Untuk karangan dalam buku: nama pengarang. tahun. judul karangan. *judul buku*. nama editor. halaman permulaan dan akhir karangan. Contoh:  
Mohanty, P. K. 1999. Municipality Decentralization and Governance: Autonomy, Accountability and Participation. *Decentralization and Local Politics*. Editor S.N. Jan and P.C. Marthur. Sage Publication. New Delphi. 212-236.
  - iii. Untuk karangan dalam jurnal/majalah: nama pengarang. tahun. judul karangan. *judul jurnall/majalah*. volume(nomor). halaman permulaan dan halaman akhir karangan. Contoh:  
Dwiyanto, Agus. 1997. Pemerintahan yang Efisien, Tanggap dan Akuntabel: Kontrol atau Etika?. *JKAP*. 1(2): 1-4.
  - iv. Untuk karangan dalam pertemuan: nama pengarang. tahun. judul karangan. *nama pertemuan*. tempat pertemuan. waktu. Contoh:  
Utomo, Warsito. 2000. Otonomi dan Pengembangan Lembaga di Daerah. *Seminar Nasional Professional Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik*. Jurusan Administrasi Negara, FISIPOL UGM. Yogyakarta. 29 April 2000.
  - v. Untuk tulisan dari sumber online: nama pengarang. tahun. judul tulisan. *nama website*. tanggal akses. Contoh:  
Pusat Kurikulum. 2008. Model Pengembangan Kompetensi Bagi Sekolah Bertaraf Internasional. [http://www.slideshare.net/plashida/savedfiles?s\\_title=model-kur-sbi-puskur-14117222&user\\_login=caca29](http://www.slideshare.net/plashida/savedfiles?s_title=model-kur-sbi-puskur-14117222&user_login=caca29). Diakses 22 Mei 2013.